



POTENSI PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) HALAL BARSELA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS DI ERA *SOCIETY 5.0*

Musrafiyan

Abstract

Society 5.0 was implemented as the 5th science and technology concept, which was adopted through the Japanese Cabinet in 2016 as an effort to invest in the regional development sector in a sustainable manner. Indonesia implements its commitment through Presidential Decree No. 59 of 2017 with a target of infrastructure development, supporting sustainable industrialization and fostering innovation, namely the construction of the Barsela Halal Special Economic Zone located in Southwest Aceh Regency, as an effort to develop a sharia-based industrial area in the context of developing sharia economy. The growth of the Barsela Halal Special Economic Zone-based industry in the national industrial development plan optimizes tourism as a priority destination. This paper discusses the local concept and potential of Southwest Aceh as the center of the Barsela Halal Special Economic Zone, the challenges of investing and implementing society 5.0 in the construction of the Barsela Halal Special Economic Zone. The method that the author uses is library research with a qualitative approach. The conclusions of this study are; First, the Barsela Halal Special Economic Zone is the only one in Indonesia that adheres to the sharia system, and is part of the support for the implementation of sustainable development based on sharia economic development. Second, the assessment of the optimization aspect of the tourism sector based on the use of technology as the main instrument in supporting development plans and promoting the Barsela Halal Special Economic Zone to foreign countries. And Third, the Barsela Halal Special Economic Zone presents the concept of a smart city by utilizing technology and resources efficiently and systematically.

Keywords: Social Development Goals, Halal Barsela Special Economic Zone, and Society 5.0

Abstrak

*Society 5.0 diterapkan sebagai konsep sains dan teknologi Ke-5, yang diadopsi melalui Kabinet Jepang pada 2016 sebagai upaya investasi sektor pembangunan daerah secara berkelanjutan. Indonesia menerapkan wujud komitmennya melalui Perpres No. 59 Tahun 2017 dengan target pembangunan infrastruktur, mendukung industrialisasi yang berkelanjutan serta membantu perkembangan inovasi, yakni salah satunya pembangunan KEK Halal Barsela yang berlokasi di Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai upaya pengembangan kawasan industri berbasis *syari'ah* dalam rangka pengembangan ekonomi *syari'ah*. Pertumbuhan industri berbasis KEK Halal Barsela dalam rencana pembangunan industri nasional mengoptimalkan pariwisata sebagai destinasi prioritas. Tulisan ini membahas tentang konsep dan potensi lokal Aceh Barat Daya sebagai pusat KEK Halal Barsela, tantangan investasi dan implementasi *society 5.0* dalam pembangunan KEK Halal Barsela. Adapun metode yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan kajian ini adalah; *pertama*, KEK Halal Barsela adalah satu-satunya di Indonesia yang menganut sistem *syari'ah*, dan menjadi bagian dukungan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berbasis pengembangan ekonomi *syari'ah*. *Kedua*, penilaian aspek optimalisasi sektor pariwisata berbasis pemanfaatan teknologi sebagai instrumen utama dalam mendukung rencana pembangunan serta mempromosikan KEK Halal Barsela ke mancanegara. Dan *Ketiga*, KEK Halal Barsela menghadirkan konsep *smart city* dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya dengan efisien dan sistematis.*

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, KEK Halal Barsela, dan *Society 5.0*

1. PENDAHULUAN

Paradigma pentingnya pembangunan didengungkan sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi pertama tahun 1972. Isu lingkungan menjadi diskursus utama yang diangkat dalam pertemuan internasional di Stockholm, Swedia. Perhatian tentang pentingnya pembangunan lingkungan telah melahirkan lembaga khusus yang *concern* menangani lingkungan hidup, yaitu *United Nations Environment Programme* (UNEP). Pentingnya isu tersebut terus bergulir hingga melahirkan suatu laporan yang melandasi pentingnya integrasi kepedulian lingkungan dan pembangunan ekonomi, baik tingkat lokal, nasional, hingga internasional, yang dikenal dengan *The Brundland Report*. Nilai utama yang dihasilkan pasca terlaksananya KTT Bumi Ke-1, yakni paradigma pembangunan yang selama ini memprioritaskan aspek ekonomi dan mengenyampingkan dampak terhadap lingkungan hidup, diubah menjadi pembangunan yang menyeimbangkan antara pemenuhan kehidupan tanpa membahayakan keadaan lingkungan serta bermanfaat untuk kehidupan generasi mendatang, hal ini lah yang menandai awal tercetusnya konsep pembangunan berkelanjutan.

Serangkaian KTT Bumi berlanjut hingga empat dekade setelahnya, yakni pada KTT Bumi Ke-3 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio De Janeiro, Brazil pada 20-22 Juni 2012. Konferensi yang dihadiri oleh pimpinan pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta perwakilan masyarakat umum ini dikenal dengan KTT Rio+20 yang dalam pembahasannya menghasilkan dokumen *The Future We Want*. Dokumen yang memuat kesepakatan bersama terhadap masa depan dunia dan penguatan komitmen politik untuk menuju pembangunan ini menjadi referensi utama pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional, nasional, dan global. Tujuan SDGs dideklarasikan oleh 193 Negara pada tanggal 25 September 2015, bertempat di Kantor Pusat PBB New York, Amerika Serikat. Garis besar tujuannya dimaksudkan sebagai upaya lanjutan dan penyempurnaan dari agenda Pembangunan Millenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dilaksanakan pada periode 2000-2015. SDGs berkomitmen bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada manusia, melainkan juga ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup yang titik beratnya terletak pada pengentasan kemiskinan di dunia tahun 2030. Adapun dalam pelaksanaannya, SDGs bertumpu pada tiga pilar, yakni Pilar sosial, Ekonomi, dan lingkungan. Yang keseluruhannya bertumpu pada 17 SDGs yang dijabarkan dalam 169 target sasaran dan 241 indikator yang saling mempengaruhi untuk mewujudkan keserasian, keutuhan, kelestarian, dan keberlanjutan. Evolusi cepat teknologi informasi dan komunikasi menjadi indikator yang membawa perubahan drastis bagi masyarakat dan industri berbasis tiga pilar penopang SDGs diatas. Dalam mengantisipasi tren global, *Society 5.0* diimplementasikan sebagai konsep inti dalam rencana dasar sains dan teknologi Ke-5, yang diadopsi oleh Kabinet Jepang pada Januari 2016 silam sebagai upaya investasi masa depan termasuk pada bagian optimalisasi sektor pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Mantan Perdana Menteri Jepang, Sinzo Abe memaparkan bahwa *Society 5.0* dimaknai sebagai suatu masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik dengan memasuki inovasi revolusi industri 4.0, semisal IoT, *Big Data*, AI, dan Robot kedalam kehidupan sosial dan industri yang biasa disebut *Super Smart Society*. Sehingga melalui konsep ini diharapkan dapat menghasilkan kecerdasan buatan dalam mentransformasikan *Big Data* yang dikumpulkan melalui internet dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga menjelma sebagai suatu kearifan baru untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka peluang bagi orang banyak. Dan secara bertahap, tujuan pembangunan menuju era *Society 5.0* telah



dirumuskan bersama 293 Negara yang selanjutnya dikodifikasi dalam agenda SDGs secara eksplisit. Termasuk Indonesia sendiri telah menyelaraskan SDGs dengan nawacita sebagai visi pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKJ) tahunan. Indonesia menerapkan wujud komitmennya melalui Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, dimana targetnya antara lain meliputi; *pertama*, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua. Dan *kedua*, membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membantu perkembangan inovasi. Salah satunya yakni melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Halal Barat Selatan (Kek Halal Barsela) yang berlokasi di Teluk Surin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK merupakan wilayah dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi disedia fasilitas dan insentif khusus sebagai pemantik investasi. Dalam pelaksanaannya, Indonesia turut berkomitmen penuh seiring mempunyai payung hukum perihal rencana pembangunan berkelanjutan dengan konsep KEK yang dilatarbelakangi oleh lahirnya UU No. 59 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Hal itu dijabarkan dalam turunan Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi; "*KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.*" Poin diatas turut diperkuat pada Pasal 2-Nya dimana "*KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan Industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.*" Secara operasional KEK juga diartikan sebagai Kawasan yang memiliki ketentuan khusus di bidang bea dan cukai, perpajakan, perizinan satu atap, imigrasi, dan ketenagakerjaan. Sehingga KEK dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.

Kawasan Barat Selatan Aceh yang selanjutnya disingkat Barsela meliputi delapan Kabupaten/Kota, antara lain; Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue, dan Kota Subulussalam dengan beragam hasil alam yang dapat diperbaharui, semisal pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yakni tambang dan mineral. Termasuk dalam halnya potensi wisata alam, bahari, religi, dan sejarah yang melimpah. Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) yang memprakarsai lahirnya KEK Halal Barsela ini akhirnya menetapkan Aceh Barat Daya (Abdy) sebagai daerah pembangunan KEK. Keputusan itu dilandasi oleh kajian sebelumnya oleh Tim Percepatan Akselerasi yang dibentuk oleh ISMI Pusat. Adapun beberapa indikator yang mendukung kajian tersebut, yakni; *pertama*, pemerintah Abdy telah melakukan *Tracing* lahan seluas 745 ha yang khusus dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri. *Kedua*, pemerintah Abdy telah merealisasikan jalan sepanjang 30 m dikawasan tersebut, ditandai dengan telah adanya *body* jalan dan pengerasan akannya, termasuk telah dimasukkannya rencana kerja tersebut kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). *Ketiga*, pemerintah Abdy telah membentuk perangkat Badan Usaha Miliki Gampong (BUMG) termasuk juga pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) berbasis Kawasan industri.

Ketua ISMI Pusat Dr. Ilham Habibie menginisiasikan KEK Halal Barsela sebagai satu-satunya KEK berbasis *Halal Tourism* yang ada di Indonesia. Konsultasi perihalnya sudah dijalin dengan Dewan *Syari'ah* Indonesia dan Dewan KEK Nasional. Hasilnya KEK Halal Barsela ini dimaksudkan sebagai kawasan yang menggagas pengelolaan keuangan secara *syari'ah*, pembagian keuntungan yang tidak berbicara *fee* melainkan keuntungan bersama, penerapan teknologi berbasis kehalalan, serta pelayanan yang dihadirkan baik, bersih rapi, sesuai *syari'ah*, termasuk investasi yang dilaksanakan sesuai tuntunan *syari'ah* pula. Berangkat dari gagasan besar nasional perihal pembangunan KEK Halal Barsela yang *concern* pada optimalisasi potensi SDA dan SDM, baik di sektor sosial, ekonomi, lingkungan, dan investasi berbasis *syari'ah* yang diprakarsai oleh ISMI bekerjasama dengan beragam instansi terkait, korelasinya dengan tindak lanjut SDGs di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai pilar utama pembangunan SDGs yang disepakati negara-negara di dunia, keselarasan SDGs dengan nawacita sebagai visi pembangunan nasional, serta komitmen Indonesia melalui Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan dan UU No. 59 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang disesuaikan dengan tantangan dan peluang perwujudannya dengan konsep *society* 5.0 sebagai evolusi cepat teknologi informasi dan komunikasi yang membawa perubahan drastis bagi masyarakat dan industri, membuat penulis tertarik untuk melihat Potensi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal Barsela sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Di Era *Society* 5.0".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat studi pustaka (*Library Research*), dimana data dikumpulkan secara kepustakaan dengan menggunakan analisis teori yang ada sebagai bahan pendukung, berikut dengan data dan informasi yang didapatkan melalui buku dan jurnal serta sumber literatur lainnya yang berasal dari seminar, diskusi publik, konferensi baik yang bersifat *daring* maupun *luring*. Sehingga disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini yakni penelitian yang menghasilkan informasi serta data bersifat deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran disertai keterangan dengan jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis perihal era *Society* 5.0, tujuan SDGs, investasi, serta optimalisasi sektor sosial, ekonomi, lingkungan dan teknologi berbasis *syari'ah*. Pendekatan kualitatif didasari pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan, untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi dan deskripsi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah Makalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai Sinkronisasi RPJMD Dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Buku Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia oleh Armida Salsiah Alisjahbana, Buku Pembangunan Berkelanjutan oleh Emil Salim, Pidato Mantan PM Jepang Shinzo Abe tentang Era *Society* 5.0, dan Dokumen terkait pembangunan KEK Halal Barsela. Selanjutnya untuk data sekunder diperoleh dari SDGs Peraturan untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Daerah, Tujuan SDGs oleh *United Cities and Local Governments* (UCLG), Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, dan UU No. 59 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal Barsela

KEK industri halal memiliki potensi besar untuk dibangun dan dikembangkan di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Ekosistem industri halal pun semakin berkembang berbasis gagasan optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan industri Halal. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dalam tawawarn gagasannya juga menyampaikan bahwa selain industri manufaktur halal, pembangunan KEK halal berbasis pariwisata jua akan menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi dan lebih kompleks mengingat belum pernah dikembangkan sebelumnya. Dimana *concern* utama yang patut diperhitungkan dan diperhatikan yakni nilai pasar hingga model bisnis.

Bidang pariwisata akan menjadi prospek menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan pasca *Covid-19*. Hal tersebut didasari pada indikator bahwa; *pertama*, pariwisata sebagai sektor penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produksi. *Kedua*, pengembangan pariwisata menstimulus investasi di bidang infrastruktur. *Ketiga*, optimalisasi pariwisata mendorong pengembangan beberapa sektor ekonomi lainnya melalui *direct*, *indirect*, dan *induced effect*. *Keempat*, pariwisata berkontribusi dalam peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan. Dan *kelima*, pariwisata menyebabkan *positive economies of scale*. Sehingga kombinasi potensi industri dan pariwisata berbasis halal (*syari'ah*) dapat dimaksimalkan kedalam konsep pengembangan KEK Halal sesuai dengan potensi Indonesia. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Enoch Suharto Pranoto pada Juni 2020 telah menyampaikan beberapa pengajuan KEK Halal, seperti Modern Cikande di Serang dan di kawasan Pulogadung, Jakarta. Kemudian pemerintah Provinsi Riau juga berkomitmen membangun KEK Halal berlokasi di kawasan Industri Tenayan, Pekanbaru. Dan KEK Halal terakhir yang juga telah direncanakan adalah KEK Barsela, di Provinsi Aceh. Hingga pada akhirnya, melalui penilaian skala prioritas ditetapkanlah KEK Halal Barsela sebagai fokus pengadaaan *grand design* pembangunan KEK Halal satu-satunya di Indonesia ini.

Penentuan tersebut dilandasi kesiapan pemerintah Abdy yang telah menyiapkan lahan 745 Ha dalam rancangan awal pembangunan KEK Halal di kawasan barat selatan. Keseriusan *master plan* pembangunan KEK Halal diawali oleh penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) kerjasama kesepakatan KEK Halal Barsela Aceh dengan ketua ISMI pusat pada akhir 2019 lalu, berikut jalinan kerjasama lainnya yang dilaksanakan secara massif dengan beragam instansi sebagai langkah awal rancangan serius perwujudan KEK Halal di Provinsi Aceh. Bukti keseriusan pemerintah juga dibuktikan pasca pertemuan antara ISMI pusat dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin. Hasilnya pemerintah mendukung penuh pembangunan KEK Halal Barsela sebagai salah satu upaya penguatan rencana pemerintah dalam pengembangan ekonomi *syari'ah*. Dalam pemaparan sebagai bagian dari penguatan gagasannya, konsep utama pembangunan KEK Halal Barsela ini adalah sebagai kawasan integrasi yang terdiri dari delapan Kabupaten dan empat Kabupaten di alur tengah untuk pembangunan arus ekonomi baru dengan program *Surin Industrial Smart City* (SISC) yang terintegrasi mulai dari pemukiman, pusat industri, hingga pelabuhan. Landasan awal konsep *smart city* ini sebagai bagian perwujudan suatu wilayah pintar yang berguna bagi masyarakat dalam melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya dengan efisien dan sistematis berdasarkan enam indikator, yakni; *Smart Economy*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, *Smart People*, *Smart Living*, dan *Smart Governance*.

3.2 Potensi Lokal Aceh Barat Daya Sebagai Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal Barsela

Sebagai daerah yang ditetapkan sebagai KEK Halal Barsela, Abdy berperan sebagai pusat pertumbuhan baru yang harus mampu memberi *Tricel Down Effect* bagi daerah lainnya sepanjang garis Barat Selatan, Aceh. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya berperan sebagai kawasan penyangga sekaligus pemasok beragam bahan baku industri, yang terdiri dari sumber daya perkebunan, pertanian, perikanan, dan kelautan termasuk penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, yang bertujuan menghasilkan sinergitas dan interkoneksi antar Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan keniscayaan serta mendukung keberhasilan pembangunan KEK Halal Barsela. KEK yang dibangun di Teluk Surin, Kabupaten Abdy dirancang dengan optimalisasi beberapa zona, yang meliputi zona industri, pengembangan teknologi, logistik, pengolahan ekspor, pariwisata, dan energi. Pemilihan Kabupaten Abdy sebagai sektor unggulan di Barat Selatan dikuatkan dengan melimpahnya ketersediaan potensi ekonomi lokal yang terintegrasi dengan penguatan pengembangan ekonomi *syari'ah*, untuk selanjutnya menjadi objek kegiatan ekonomi utama KEK Halal Barsela. Mantan Gubernur Aceh, Prof. Dr. Ibrahim Hasan dalam pandangannya terdahulu menyimpulkan, bahwa wilayah Aceh ini terbagi menjadi dua zona, yaitu Zona Industri di wilayah pantai Utara dan Timur dan Zona Pertanian di Wilayah Barat, Selatan, dan Tengah. Pembagian zona ini dimaksudkan sebagai pengembangan wilayah sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan masing-masing wilayah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Abdy tahun 2021 dalam sektor perkebunan, luas areal Kelapa Sawit (*Oil Palm*) adalah 19.477,68 Ha, dengan areal terbesar berada di Kecamatan Babahrot yakni 9.488 Ha, dengan jumlah produksi sebanyak 173,18 Ribu Ton per tahun. Kemudian luas areal Kelapa (*Coconut*) adalah 1.966 Ha, dengan areal terbesar berada di Kecamatan Kuala Batee yakni 305 Ha, dengan jumlah produksi sebanyak 11,95 Ribu Ton per tahun. Selanjutnya di bidang pertanian, luas areal Cabai Besar (*Big Chili*) adalah 81 Ha, dengan areal terbesar berada di Kecamatan Babahrot yakni 29 Ha, dengan jumlah produksi sebanyak 1.017 Kuintal per tahun. Kemudian luas areal Cabai Rawit (*Chili/Cayenne Pepper*) 48 Ha, dengan areal terbesar berada di Kecamatan Babahrot dengan 13 Ha, dengan jumlah produksi sebanyak 655 Kuintal Per Tahun. Adapun pada sektor perikanan, luas areal Budidaya Ikan (Perikanan Darat) adalah 1.232,36 Ha, yang meliputi tambak, kolam, sawah, dan keramba, dengan areal terbesar berada di Kecamatan Kuala Batee dengan 296,09 Ha. Kemudian luas areal Perikanan Perairan Umum adalah 267,95 Ha, yang mayoritas melalui sungai, dengan areal terbesar berada di Kecamatan Susoh dengan 60,41 Ha, dengan jumlah produksi sebanyak 66,55 Ton Per Tahun.

Berlanjut di sektor pariwisata, jumlah Akomodasi Hotel di Kabupaten Abdy sebanyak 11 Hotel dengan 160 Kamar, dimana jumlah pengadaan hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Blang Pidie dengan 9 Hotel. Tercukupinya jumlah hotel tersebut didukung dengan jumlah Rumah Makan/Restoran sebanyak 94 buah yang keberadaannya di dominasi pada Kecamatan Blang Pidie dengan 49 Rumah Makan. Untuk dapat mengoptimalkan informasi berbasis pendataan yang rinci dan signifikan, maka penulis turut menyertakannya kedalam sebuah tabel di bawah ini, yang merangkum beberapa sektor yang menjadi nilai unggulan di Kabupaten Abdy, yakni Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata:



Tabel 1. Pertanian, Perkebunan, dan Tanaman Pangan

Sektor	Jenis Sumber Daya	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Kuintal/Ton)
Pertanian/Hortikultura	Cabai Merah	81	1.017 Kuintal
	Cabai Rawit	48	655 Kuintal
	Tomat	13	135 Kuintal
	Bayam	63	303 Kuintal
	Kacang Panjang	63	868 Kuintal
Perkebunan	Kelapa Sawit	19.477,69	173,18 Ribu Ton
	Kelapa	1.966	11,95 Ribu Ton
	Karet	536,50	1,74 Ribu Ton
	Kopi	696	1,73 Ribu Ton
	Kakao	1.854,65	13,04 Ribu Ton
	Tebu	0,50	-
Tanaman Pangan	Padi	16.498	119,408 Ton
	Jagung	1.833	17.270 Ton
	Kacang Kedelai	23	73,50 Ton
	Kacang Hijau	15	20 Ton
	Kacang Tanah	116	418 Ton
	Ketela Pohon	59	79,5 Ton
	Ubi Jalar	16	51,5 Ton

Sumber: Data Badan Pusat Statistika (BPS) Aceh Barat Daya 2021

Tabel 2. Perikanan

Sektor	Jenis Sumber Daya	Jenis Areal Budidaya	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Perikanan	Perikanan Darat	Tambak	837,71	16.272,20 Ton
		Kolam	384,36	
		Sawah	9,91	
		Keramba	0,38	
	Jumlah		1.232,36	16.272,20 Ton
	Perikanan Perairan Umum	Sungai	267,95	66,55 Ton
Jumlah		267,95	66,55 Ton	

Sumber: Data Badan Pusat Statistika (BPS) Aceh Barat Daya 2021

Tabel 3. Pariwisata

Sektor	Jenis	Jumlah
Pariwisata	Akomodasi Hotel	11
	Rumah Makan/Restaurant	94

Sumber: Data Badan Pusat Statistika (BPS) Aceh Barat Daya 2021

Beberapa komoditi unggulan dan sarana pendukung optimalisasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang penulis paparkan diatas hanya mencakup sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Abdy, tanpa menyertakan beberapa Kabupaten/Kota lainnya yang berada sepanjang garis Barat Selatan Aceh. Hal tersebut dimaksudkan sebagai gambaran umum dalam lingkup kecil satu Kabupaten, yakni Abdy perihal beragam hasil alam dan buatan yang dimaksudkan sebagai sumber daya unggulan yang ada di kawasan perencanaan pembangunan KEK Halal Barsela. Sehingga daripadanya, dibutuhkan sinergitas sekaligus interkoneksi antar Kabupaten/Kota sebagai penopang utama dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan KEK Halal Barsela berbasis sinergitas dan gagasan dari beberapa Kabupaten/Kota pendukung sebagai kekuatan utama pembangunan Kawasan berbasis *syari'ah* satu-satunya di Indonesia ini. Data lanjutan senantiasa dapat disertakan sejalan dengan pembahasan dan dukungan akan kajian penulis sebagai salah satu bagian pemanfaatan literatur dalam mewujudkan KEK Halal Barsela di Provinsi Aceh.

3.3 Tantangan Investasi Masa Depan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal Barsela

Ketua ISMI Pusat, Dr. Ilham Habibie mengatakan bahwa KEK Halal Barsela adalah suatu gagasan pembangunan luar biasa yang memiliki potensi nilai investasi hingga 5 Triliun Rupiah, dimana sektor industri yang diutamakan berangkat dari sumber daya alam yang mayoritas berasal dari sektor pertanian dan perkebunan, salah satunya Kelapa Sawit yang cukup banyak penyebaran lahannya di Aceh, terutama pantai Barat Selatan. KEK Halal yang berbasis *syari'ah* ini dimaksudkan sebagai perwujudan dan dukungan atas program pemerintah soal penguatan ekonomi *syari'ah* yang tidak hanya eksis di bidang perbankan dan keuangan, melainkan juga dapat diwujudkan melalui pelaku bisnis lainnya, termasuk dalam halnya tekstil. Pengembangan ekonomi *syari'ah* di era *society* 5.0 berpeluang menggantikan posisi ekonomi konvensional. Pembangunan KEK Halal Barsela pula menjadikannya terobosan pembaharu dalam hal menyambut kebangkitan ekonomi *syari'ah* yang dapat bersaing di era globalisasi hingga mencapai target eksistensi pada era *society* 5.0. Artinya target yang dinisiasikan oleh ISMI serta disambut luar biasa oleh dukungan dari pemerintah pusat termasuk upaya dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi sumber daya alam dan buatan di beberapa wilayah yang selanjutnya dianggap layak sebagai target pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemaparan beberapa poin diatas setidaknya menyadarkan kita bahwa optimalisasi ekonomi berbasis *syari'ah* yang diwujudkan dalam pembangunan KEK Halal Barsela memerlukan kajian mendalam yang terfokus pada tantangan besar pra pembangunan, ketika pembangunan berjalan, hingga pasca pembangunan. Hal ini berangkat dari suatu indikator bahwa terdapat beberapa tantangan substansial yang wajib diperhatikan. Dalam kajian kali ini, penulis turut mengelompokkannya kedalam tiga hal, yakni; *pertama*, belum optimalnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional, sehingga diperlukan program penyiapan SDM yang matang. *Kedua*, sinkronisasi kebijakan berbasis aspek yuridis dan sosiologis dengan instansi terkait dalam hal memudahkan langkah-langkah pembangunan hingga pengembangan beberapa sektor yang menjadi target utama. Dan *ketiga*, penguasaan teknologi yang mumpuni, poin ini wajib diutamakan karena era *society* 5.0 pada dasarnya memiliki korelasi dengan pengembangan SDM Karena era *society* dicetuskan sebagai pembaharu yang menempatkan manusia sebagai komponen utama didalamnya dan dituntut untuk lebih cepat menghasilkan solusi dalam memenuhi kebutuhannya.



Mewujudkan pembangunan KEK Halal Barsela berikut dengan pengembangannya dibutuhkan konsistensi lintas sektor dan generasi, dimana dalam hal nya penting memahami tiap kendala terutama dalam perekrutan tenaga kerja yang berbasis keilmuan mumpuni sebagai bekal pengembangan SDM lokal. Program penyiapan SDM harus menjadi program pemerintah Aceh secara umum dan Abdyia khususnya disamping pembangunan KEK Halal Barsela yang diawali pembebasan lahan sebagai prioritas utama, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adagium *Buya Krueng Teudong-dong, Buya Tameng Meuraseuki* ditengah masyarakat luas. Sehingga untuk mewujudkan SDM yang berkompeten dibidangnya dapat dioptimalkan dengan pola penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Salah satunya ialah melalui sekolah kejuruan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri untuk menjunjung tinggi sumber daya lokalitas Aceh. Tantangan kedua yang menyoal tentang sinkronisasi kebijakan, bahwa dengan minimnya komunikasi konstruktif yang dibangun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan mengakibatkan banyaknya kebijakan strategis dalam pengambilan keputusan pembangunan KEK Halal Barsela nantinya tidak dijalankan sesuai dengan tujuan awal. Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan ini pada dasarnya difokuskan pada tiga hal, yakni pelaksanaan analisis kebijakan, pelaksanaan konsentrasi kebijakan itu sendiri, dan penyusunan laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan. Konsentrasi penulis menyikapinya dengan mengambil dua aspek utama dalam menyoal tentang sinkronisasi kebijakan ini, yakni aspek yuridis dan filosofis.

Pertama, aspek yuridis dimaksudkan dalam persoalan yang menyangkut legalitas, landasan hukum, termasuk dalam halnya menyangkut proses administrasi yang seyogyanya didasari oleh payung hukum yang kuat. Kestabilan dalam perancangan hingga berwujud pembangunan akan tercipta tatkala hierarki perundang-undangan dipahami dengan jelas dan konkret, serta tidak saling tumpang tindih. Sebaliknya, gagasan kuat diawal akan menghasilkan hasil yang tidak sesuai keinginan bahkan berbanding terbalik perencanaan tatkala landasan hukum yang digunakan tidak berbasis pada tujuan utama pembangunan. Semisal, program yang akan dibangun ialah KEK Halal Barsela, yang secara khusus menganut paham *pensyari'atan*, namun dalam implementasinya mengenyampingkan aturan perundang-undangan ekonomi *syari'ah*, seperti di Aceh dengan keberadaaan Qanun Lembaga Keuangan *Syari'ah* dan Qanun pendukung penegakkan *syari'ah* lainnya, termasuk pola perumusan soal industri dalam pembangunan KEK Halal Barsela. Dan *kedua*, aspek sosiologis, salah satu upaya terencana untuk mewujudkan pembangunan KEK Halal yang berkualitas serta penduduk yang tumbuh seimbang sejalan dengan pelaksanaan pembangunan tersebut dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi adalah perkembangan penduduk dan pembangunan. Kualitas penduduk yang dimaksud adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan.

Perhatian akan aspek sosiologis dalam pembangunan KEK Halal Barsela ini merupakan hal utama dalam menampilkan rasa kepedulian akan penduduk setempat, sebagai bagian dari masyarakat adat di daerah Teluk Surin, Kabupaten Abdyia. Hal itu didasari oleh suatu indikator, dimana penduduk merupakan modal dasar dan faktor dominan pembangunan yang menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta perwujudan SDGs. Adapun hakikat pembangunan nasional secara berkelanjutan sendiri adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Tantangan terakhir dalam mewujudkan investasi masa depan KEK Halal Barsela adalah penguasaan teknologi yang masih rendah. Seorang ekonom,

Schumter mengatakan bahwa penguasaan teknologi merupakan bagian yang paling penting dari determinan suatu pembangunan ekonomi. Penguatan kapasitas dalam hal pengembangan teknologi sangat dibutuhkan sejalan dengan perwujudan konsep *Smart City* pada KEK Halal Barsela, dimana konsep *smart city* ini sendiri diwujudkan berbasis pemanfaatan teknologi secara keseluruhan. Realisasi KEK Halal Barsela sebagai destinasi pariwisata prioritas di era *society* 5.0 secara konkret menitikberatkan pada pentingnya teknologi untuk menciptakan suatu kebiasaan dalam lingkup masyarakat luas untuk dapat menyelesaikan berbagai tantangan sosial dengan memasukkan inovasi revolusi industri 4.0, semisal IoT, Data Besar, Kecerdasan Buatan, dan Robot kedalam setiap industri dan kehidupan sosial.

3.4 Analisis Implementasi *Society* 5.0 dalam Rancangan dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Halal Barsela sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas

Sebagian besar potensi pariwisata di Abdyta meliputi objek perairan, yang didominasi oleh objek laut dan pantai. Menurut data Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdapat paling kurang 12 destinasi wisata yang didominasi oleh objek wisata laut dan pantai sebesar 80%. Beberapa destinasi terkenal sebagai bagian dari potensi zona pemanfaatan terdiri dari Pantai Bali, Pantai Jilbab, dan Pulau Gosong. Peruntukan zona pemanfaatan pada beberapa destinasi wisata diatas didasari pada; *pertama*, perlindungan habitat dan populasi hasil laut. *Kedua*, pariwisata dan rekreasi. *Ketiga*, penelitian dan pengembangan. Dan *keempat*, pendidikan. Adapun peraturan zona pemanfaatan wisata bahari dengan luas 77,27 Ha secara umum antara lain wisata menyelam, *snorkeling*, wisata pantai, pembuatan foto dan film, dan *outbond training*. Dan secara keseluruhan melarang aktivitas yang merusak ekosistem.

Hanya saja hingga saat ini potensi pariwisata tersebut belum dimaksimalkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disamping upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Abdyta dalam mempercepat pembangunan sektor pariwisata sebagai target mewujudkan beberapa objek sebagai destinasi pariwisata prioritas, sesuai dengan amanah Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, yang dimuat dalam Pasal 5 Poin (a); "*bahwa pemerintah Aceh berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataaan Aceh.*" Kemudian untuk mencapai target sebagai pariwisata prioritas, diperkuat kembali oleh Pasal 8 Ayat (1), "*bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataaan di Aceh dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataaan.*" Potensi pembangunan sektor pariwisata sebagai bagian perencanaan KEK Halal Barsela melalui sistem perancangan yang konkret akan menonjolkan destinasi wisata prioritas dan diterima masyarakat luas, karena daerah ini berada pada posisi paduan antara Pantai Samudera Hindia dan Bukit Barisan yang hijau.

Pengembangan KEK Halal Barsela sejalan dengan Perpres No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, dan UU No. 59 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, ditargetkan memberi peluang peningkatan investasi melalui kawasan-kawasan yang memiliki keunggulan dan nilai ekonomis tinggi, dan hal tersebut direncanakan terwujud dengan gagasan pengembangan sektor pariwisata sebagai skala prioritas. Program prioritas nasional percepatan pertumbuhan industri berbasis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal Barsela di Kabupaten Abdyta yang terimplementasi dalam rencana pembangunan industri nasional dengan optimalisasi sektor pariwisata sebagai destinasi unggulan, menjelaskan bahwa kawasan Barat Selatan, Provinsi Aceh akan dijadikan satu-satunya perwujudan kawasan ekonomi berbasis



syari'ah di Indonesia. sehingga program nasional dibawah Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan dikoordinatori oleh ISMI ini merupakan momentum besar dan penting bagi Kabupaten Abdyia khususnya, dan Aceh secara umum untuk dapat mengembangkan diri menjadi salah satu kawasan ekonomi penting yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian negara.

Dengan penjabaran situasi dan dan strategi pengembangan sejauh ini, penulis membangun sebuah konstruksi awal untuk digunakan sebagai dasar penting dalam membangun dan mengembangkan wilayah Abdyia sebagai Kawasan perwujudan KEK Halal Barsela serta kawasan strategis nasional di Indonesia bagian Barat. Pemahaman tersebut mengarah pada implementasi gagasan besar menyambut era *society* 5.0 dalam tata kelola pengembangan sektor kepariwisataan di Abdyia dalam rangka mewujudkan destinasi pariwisata prioritas seiring dengan agenda strategis pembangunan KEK Halal Barsela. Analisa utama yang menjadi konsentrasi penulis yakni penilaian akan aspek optimalisasi sektor pariwisata berbasis pemanfaatan teknologi sebagai instrumen utama dalam mendukung rencana pembangunan serta mempromosikan ke dunia internasional akan kawasan pertama berbasis *syari'ah* berwujud KEK Halal Barsela.

Hasil analisis menunjukkan bahwa persiapan Kabupaten Abdyia dari aspek sosial, budaya, kependudukan, serta sumber daya sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dikelola menjadi kawasan strategis nasional dengan konsep Kawasan Ekonomi *Syari'ah*. Indikatornya meliputi angka kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, disertai dukungan angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan. Perbaikan berbagai aspek tersebut didasari oleh komitmen penuh pemerintah dan masyarakat akan kebijakan dan program percepatan pembangunan dengan menganut konsep SDGs yang menargetkan pembangunan lingkungan hidup yang titik beratnya terletak pada pengentasan kemiskinan di dunia tahun 2030, serta dukungan akan program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengenai Sinkronisasi RPJMD Dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Dosen Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Firman Arifin menjabarkan bahwa dalam kaitannya dengan pengembangan sektor pariwisata dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus industri dan teknologi (IT) memiliki peranan khusus untuk menghadapi laju era *society* 5.0. Maksudnya ialah bahwa IT merupakan sebuah produk yang dibuat oleh *developer* sebagai dukungan dari SDM dalam membuat inovasi secara massif dalam rangka optimalisasi pembangunan pariwisata di mata dunia, sehingga bertujuan menarik wisatawan asing sekaligus meningkatkan presentase wisatawan lokal dan mancanegara di KEK Halal Barsela.

Merujuk poin utama urgensi pemanfaatan IT diatas, penulis menawarkan beberapa solusi dasar sebagai bagian dari langkah IT dan peranannya dalam mewujudkan objek Pariwisata sebagai destinasi prioritas dalam rangka mendukung program strategis pembangunan KEK Halal Barsela. Adapun diantaranya, meliputi; *pertama*, dalam pesawat pertama harus disertai software, dimana yang paling penting ialah adanya *device* dan infrastruktur seperti komputer, jaringan koneksi yang kedepannya akan menggunakan 5G. *Kedua*, inisator KEK Halal Barsela bersama pemerintah dan instansi terkait wajib menyediakan sistem *artificial intelligence* dan *big data*, yaitu program yang harus ada dalam sistem komputer, untuk meng-*input* data yang sudah ada, sehingga analisis mampu memberikan informasi yang akurat. Dan *Ketiga*, IT seperti sensor *network*, *robotics*, 3D *printing*, VR, AR, MR, XR, *extended reality*, *gene therapy*, dan *blockchain* harus digunakan, tidak hanya dalam perwujudan KEK Halal Barsela ini, melainkan di beberapa penjuror prioritas di Indonesia. Sehingga merujuk penjelasan eksplisit beberapa paragraf diatas, Kabupaten Abdyia akan senantiasa siap dan berhasil dijadikan salah satu kawasan

unggulan ekonomi nasional berbasis Kawasan Ekonomi Khusus Halal di pantai Barat Selatan Aceh, dimana secara geografis dan demografis memiliki keunggulan ekonomis dan strategis sebagai bagian penting pembangunan nasional yang memiliki *comparative advantage* dan *competitive advantage* serta memiliki *high economic value* dan *investment value* yang mampu bersaing dengan Kawasan Ekonomi Khusus dan wilayah startegis lainnya yang didasari tengan pengaplikasian IT berbasis era *society* 5.0.

4. KESIMPULAN

KEK Halal Barsela memiliki potensi besar untuk dibangun dan dikembangkan di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim. Sektor pariwisata pun menjadi prospek menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan pasca *Covid-19*. Pengajuan Kabupaten Abdy sebagai daerah fokus pembangunan kawasan khusus telah melalui penilaian skala prioritas sebagai fokus pengadaan *grand design* pembangunan KEK Halal satu-satunya di Indonesia ini serta bagian dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berbasis pengembangan ekonomi *syari'ah*. Konsep utama pembangunan KEK Halal Barsela ini adalah sebagai kawasan integrasi pengembangan arus ekonomi baru dengan program *Surin Industrial Smart City* (SISC) yang terintegrasi mulai dari pemukiman, pusat industri, hingga pelabuhan. Landasan awal konsep *smart city* ini memanfaatkan teknologi dan sumber daya dengan efisien dan sistematis berdasarkan enam indikator, yakni; *Smart Economy*, *Smart Mobility*, *Smart Enivironment*, *Smart People*, *Smart Living*, dan *Smart Governance*. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Abdy tahun 2021, sektor unggulan yang terdapat di daerah tersebut meliputi perkebunan, pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dioptimalkan melalui beberapa zona, yakni industri, pengembangan teknologi, logistik, pengolahan eskpor, dan energi. Sehingga daripadanya, dibutuhkan sinergitas sekaligus interkoneksi antar Kabupaten/Kota sepanjang pantai Barat Selatan sebagai penopang utama dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan KEK Halal Barsela

Namun dalam pembangunan hingga pengembangannya kemudian, KEK Halal Barsela akan berhadapan dengan tantangan di dunia investasi, antara lain tantangan substansial meliputi belum optimalnya SDM yang kompeten dan professional, sinkronisasi kebijakan berbasis aspek yuridis dan sosiologis dengan instansi terkait dalam hal memudahkan langkah-langkah pembangunan hingga pengembangan beberapa sektor yang menjadi target utama, dan minimnya penguasaan teknologi. Poin terakhir menjadi yang terpenting karena pengembangan teknologi sangat dibutuhkan sejalan dengan perwujudan konsep *Smart City* pada KEK Halal Barsela. IT menjadi produk yang dibuat oleh *developer* untuk mendukung pembuatan inovasi secara massif dalam rangka optimalisasi pembangunan pariwisata di KEK Halal Barsela bagi mata dunia, sehingga bertujuan menarik wisatawan asing sekaligus meningkatkan presentase wisatawan lokal dan mancanegara. Sehingga Kabupaten Abdy akan senantiasa siap menjadi salah satu kawasan unggulan ekonomi nasional berbasis Kawasan Ekonomi Khusus Halal di pantai Barat Selatan Aceh, dengan pemanfaatan teknologi era *society* 5.0



UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad *Salallahu 'Alaihi Wa Sallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa dan membimbing umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua, yakni Ayahanda Mustajab, S.Pd dan Ibunda Sugianti yang telah memberikan kasih sayang serta motivasi selama penulisan karya ilmiah ini berlangsung. Selanjutnya terimakasih kepada Ibu Mumtazinur, M.A dan Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, tempat penulis menuntut ilmu selama bangku perkuliahan. Dan juga kepada seluruh sahabat seperjuangan dan keluarga besar lintas organisasi tempat penulis berproses dan belajar memaknai pentingnya suatu organisasi dalam melalui berbagai tantangan kehidupan dan tawaran solusi akannya. Kemudian kepada Panitia *International Conference on Islamic Studies (ICIS) 2021* Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan gagasan ini dalam forum Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. N. Jamaluddin, "Sosiologi Pembangunan," Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- [2] A. Mashdurohatun, "Tantangan Ekonomi *Syari'ah* Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, pp. 80-81, Februari 2011.
- [3] A. P. Yakup, "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, pp. 1, 2019.
- [4] A. S. Alisjahbana, and E. Murniningtyas, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi," Bandung: Unpad Press, 2018.
- [5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, "Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2021," Aceh Barat Daya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2021.
- [6] Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang, "Laporan Penataan Zonasi KKPD Aceh Barat Daya," 2019.
- [7] Dikutip dari <https://ismi.id/2019/10/21/renacana-pembangunan-kek-surin-halal-barsela/> pada 25 September 2021, Pukul 22.13 WIB.
- [8] Dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/bertemu-wapres-maruf-amin-ismi-laporkan-rencana-pembangunan-kek-halal.html?page=1> pada 25 September 2021, Pukul 18.12 WIB.
- [9] D. T. S. Junias, M. A. Elim, and R. S. B. Suharto, "Kajian Perspektif Pengembangan Wilayah Kabupaten Rote Ndao Sebagai Salah Satu Kawasan Ekonomi Khusus," *Jurnal JAKA (Akuntansi, Keuangan dan Audit)*, vol. 3, no. 1, pp. 15-17, Juni 2018.
- [10] E. Safitri, "Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu," *Tesis*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pp. 28-29, 2018.
- [11] F. A. Hadi, "Implementasi Konsep *Smart City* di Kota Malang Menuju Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Sospoli*, vol. 1, no. 1, pp. 24, 2021.

-
- [12] I. J. Azis, L. M. Napitupulu, A. A. Patunru, and B. P. Resosudarmo, "Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim," Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- [13] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, "Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi-Edisi III Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)," Jakarta: Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPS/Bappenas, 2020.
- [14] Nirhayati, "Aspek Hukum Kawasan Ekonomi Khusus (Studi Mengenai Kawasan Batam)," *Tesis*, Magister Hukum Universitas Indonesia, pp. 15, 2008.
- [15] N. N. L. Handayani, and N. K. E. Muliastri, "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era *Society* 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar)," Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP, Kalimantan Tengah: Palangkaraya, 2020.
- [16] Pemaparan Dosen Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Firman Arifin dalam Seminar Nasional dan *Call for Papers* Sains dan Teknologi ke-2, dengan Tema Peran IT dan Industri Dalam Menghadapi Era *Society* 5.0, yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, pada 10 Juni 2021 yang dikutip melalui <https://umsida.ac.id/peran-sumber-daya-manusia-hadapi-era-society-5-0/> pada 28 September 2021, Pukul 01.21 WIB.
- [17] Pemaparan Presiden Direktur Batam Aero Technic, I Nyoman Rai Pering dalam Seminar Nasional dan *Call for Papers* Sains dan Teknologi ke-2, dengan Tema Peran IT dan Industri Dalam Menghadapi Era *Society* 5.0, yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, pada 10 Juni 2021 yang dikutip melalui <https://umsida.ac.id/umsida-jelaskan-peran-it-dalam-perkembangan-era-society-5-0/> pada 28 September 2021, Pukul 01.25 WIB.
- [18] Pendapat Ibrahim Hasan yang dikutip dari tulisan Wakil Rektor 1 Universitas Teuku Umar, yang dimuat dalam <http://utu.ac.id/posts/read/barsela-menuju-sentral-perkebunan-aceh> pada 26 September 2021, Pukul 17.53 WIB.
- [19] Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan.
- [20] Pidato Sinzo Abe dalam *World Economic Forum* di Davos, Swiss pada Januari 2019.
- [21] Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.
- [22] Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- [23] Unsur-Unsur Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lembaga Terkait, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi dan Organisasi Kemasyarakatan, "Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia," Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2017.
- [24] Unsur-Unsur Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lembaga Terkait, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi dan Organisasi Kemasyarakatan, "Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)," Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2017.
- [25] Wawancara Bersama Ketua Bidang Industri Halal dan Industri Kreatif DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) yang dikutip dari <https://www.republika.id/posts/7918/kek-halal-makin-potensial> pada 23 September, Pukul 11.39 WIB.
- [26] Wawancara Bersama Ketua ISMI Aceh, Nurchalis, yang dikutip melalui <https://dialeksis.com/dialog/nurchalis-kek-barsela-satu-satunya-kek-halal-di-indonesia/> Pada Selasa, 21 September 2021, Pukul 01.17 WIB.